

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut China Selatan menjadi fokus isu keamanan sepanjang dekade 90-an dalam hubungan Internasional di ASEAN paska perang dingin. Kawasan ini merupakan wilayah cekungan laut yang membatasi negara-negara besar dan kecil seperti China, Vietnam, Philipina, Malaysia, Burma, dan Taiwan. Dalam wilayah laut China selatan ini terdapat kepulauan Spratly dan kepulauan Paracel. Pada berbagai kajian tentang kepulauan Spratly lebih mengemuka karena melibatkan beberapa negara ASEAN sekaligus, sementara kepulauan Paracel hanya melibatkan Vietnam dan China.¹

Konflik Laut China Selatan tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan akan sumber daya yang melimpah di Laut China Selatan, mulai dari minyak, ikan, dan jalur transportasi yang strategis. Kandungan minyak dan gas alam di kawasan ini membuat China bersikeras untuk mengklaim kawasan Laut China Selatan ini. Menurut perkiraan China, kawasan laut China selatan memiliki kandungan minyak tidak kurang dari 105 hingga 213 milyar barel. Sementara perkiraan *U.S. Geological Survey* kandungan minyaknya tidak lebih dari 28 milyar barel.²

¹ Cipto, Bambang. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

² Ibid

Di samping itu, kawasan Laut China Selatan juga dikenal kaya dengan ikan yang merupakan sumber gizi penduduk di sekitarnya. Ditinjau dari hasil lautnya yang melimpah kawasan laut China Selatan diperkirakan mampu menyediakan kebutuhan protein bagi satu milyar penduduk Asia, atau paling tidak 500 juta penduduk kawasan pantai laut China Selatan. Selain itu, Kawasan Laut China Selatan juga merupakan jalur strategis karena lebih dari empat puluh ribu kapal melewati jalur ini tiap tahunnya. Kawasan ini merupakan jalur utama kapal-kapal dari Timur Tengah yang mensuplai kebutuhan minyak bumi Jepang. Sebaliknya Jepang juga membutuhkan keamanan laut China Selatan karena merupan jalur utama bagi kapal-kapal Jepang untuk ekspor barang-barang produksinya menuju Asia dan Eropa. Ekonomi Jepang yang bergantung pada komoditas ekspor berupa baran-barang elektronik jelas membutuhkan stabilitas dan keamanan laut China Selatan.³

Konflik Laut China Selatan telah dimulai sejak akhir abad ke-19 ketika Inggris mengklaim kepulauan Spratly, diikuti oleh China pada awal abad ke-20 dan Perancis sekitar tahun 1930-an. Di saat berkecamuknya Perang Dunia kedua Jepang mengusir Perancis dan menggunakan kepulauan Spratly sebagai basis kapal selam. Dengan berakhirnya perang dunia kedua, Perancis kembali mengklaim kawasan tersebut sebagai bagian dari kepentingan keamanan nasionalnya. Sejak tahun 1970 klaim terhadap kawasan tersebut meningkat pesat sejalan dengan perkembangan di bidang penemuan dan hukum Internasional. Perkembangan pertamam menyangkut ditemukannya ladang

³ Ibid

minyak yang diperkirakan cukup banyak di kawasan tersebut berdasarkan survey geologi yang dilakukan para peneliti dari perusahaan Amerika dan Inggris. Penemuan ini jelas membuat nilai pulau-pulau serta batu karang di kawasan tersebut meroket. Perkembangan kedua, berkaitan dengan ditetapkannya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut bagi setiap negara berdasarkan ketentuan dari UNCLOS (*United Nations Conference on the Law of the Sea*).⁴

Terbukanya peluang untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi kawasan Laut China Selatan dengan sendirinya mendorong negara-negara yang garis pantainya berbatasan langsung dengan kawasan tersebut segera melakukan klaim terhadap sebagian pulau, kepulauan, atau karang yang masuk dalam kawasan negaranya sebagaimana ditentukan oleh hukum laut internasional di atas. China, Vietnam, Philipina, Malaysia berlomba-lomba mengklaim, mengirim pasukan untuk mengamankan pulau yang mereka klaim, bahkan memberi konsesi pada perusahaan-perusahaan minyak asing, khususnya Amerika dan Inggris, untuk melakukan eksplorasi minyak di kawasan yang mereka klaim masing-masing. Persaingan dalam proses pernyataan hak ini berkembang menjadi konflik militer⁵.

Filipina yang wilayahnya terkena imbas langsung dari klaim sepihak China tersebut menjadi resah, karena klaim tersebut yang dinamakan *nine-dash Line* mengakibatkan beberapa wilayah territorial Filipina menjadi hilang,

⁴ Ibid

⁵ Ibid

termasuk di dalamnya atol dan pulau-pulau kecil yang ada di kepulauan spratly dan wilayah karang Scarborough. Tidak hanya itu, Filipina juga menuduh China menyerang kapal-kapal nelayan Filipina, banyak kapal-kapal nelayan Filipina yang melaut di kepulauan Spartly dan Scarborough Shoal dihadang oleh kapal-kapal *Coast Guard* China. Kapal-kapal nelayan Filipina tersebut dihadang dengan berbagai macam cara, seperti ditabrak, ditembak dengan water canon, hingga pelucutan hasil dan alat-alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan Filipina. Hal ini menyebabkan nelayan-nelayan Filipina tidak berani melaut ke wilayah tersebut.⁶

Beberapa konflik dan gesekan-gesekan militer pun terjadi antara China dengan Filipina. Konflik aktual ini mulai dipicu 8 April saat pihak berwenang Filipina memergoki 8 kapal penangkap ikan China di Karang Scarborough. Ketika angkatan laut Filipina akan menangkap para nelayan tersebut, tindakan ini dihalangi aksi kapal China lainnya. Kedua negara mengklaim kepemilikan pulau kecil di Laut China Selatan itu, yang terletak sekitar 230 kilometer dari Filipina dan lebih dari 1200 kilometer dari China.⁷ Klaim ini membuat Filipina berang, berbagai cara dilakukan Filipina untuk menghentikan upaya China untuk menguasai Laut China Selatan, terutama Pulau-pulau kecil yang masih dalam teritorial Filipina.

Dari jalur militer sendiri, Filipina merupakan negara di kawasan Laut China Selatan yang kekuatan militernya paling lemah. Dalam daftar *Global*

⁶ <http://www.antaranews.com/berita/478426/filipina-desak-china-tunjukkan-rasa-hormat-di-laut-china-selatan> diakses pada tanggal 17 Juli 2015

⁷ <http://www.dw.de/sengketa-antara-cina-dan-filipina/a-15945850> diakses pada 4 Mei 2015

Fire Power, Filipina berada dalam urutan ke 40, masih tertinggal dari negara tetangganya seperti Malaysia dan Vietnam. Dengan kekuatan militer yang bisa dikatakan lemah. Filipina pun akan sangat dirugikan jika konflik militer meletus di Laut China Selatan. Oleh karena itu, penguatan militer adalah salah satu cara yang mungkin bisa meningkatkan kemampuan bertahan Filipina di kawasan Laut China Selatan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Strategi Filipina dalam menghadapi China dalam Konflik Laut China Selatan?

C. Kerangka Berpikir

1) Konsep Diplomasi

Kata “diplomasi” diyakini berasal dari kata Yunani “diploun” yang berarti “melipat”. Menurut Nicholson, pada masa kekaisaran Romawi semua paspor, yang melewati jalan milik negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat dan dijahit jadi satu dalam cara yang khas. Surat jalan inilah yang disebut “diplomas”. Kemudian kata ini berkembang dan mencakup pula dokumen-dokumen resmi yang bukan logam, khususnya yang memberikan hak istimewa tertentu atau menyangkut perjanjian dengan suku bangsa asing di luar bangsa Romawi. Karena perjanjian-perjanjian ini semakin menumpuk, arsip kekaisaran menjadi beban bagi dengan dokumen-dokumen kecil yang tak terhitung jumlahnya yang dilipat dan diberikan dalam cara khusus. Isi surat resmi negara yang dikumpulkan, disimpan di arsip, yang

berhubungan dengan hubungan internasional, dikenal pada Zaman Pertengahan sebagai *diplomaticus* atau *diplomatique*.

Definisi

Menurut The Oxford English Dictionary memberi konotasi sebagai berikut “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil, bisnis atau para diplomat”. Menurut Chamber’s Twentieth Century Dictionary, diplomasi adalah seni berunding, khususnya tentang perjanjian di antara negara-negara.

Harold Nicholson, salah seorang pengkaji dan praktisi yang pandai dalam hal diplomasi di abad ke-20 menegaskan bahwa dalam bahasa yang lebih mutakhir kata diplomasi secara gegabah diambil untuk menunjukkan paling tidak lima hal yang berbeda. Dari kelima hal tersebut empat hal yang pertama menyangkut politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, dan suatu cabang dinas di luar negeri. Ia selanjutnya mengatakan bahwa interpretasi kelima merupakan suatu kualitas abstrak pemberian, yang dalam arti baik mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional.

KM panikkar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy* menyatakan bahwa diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Ivo D. Duchacik berpendapat bahwa diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain. Tetapi diplomasi

terkadang juga dihubungkan dengan perang. Oleh karena itulah Clausewitz, seorang filosof Jerman, dalam pernyataannya yang terkenal mengatakan bahwa perang merupakan kelanjutan diplomasi dengan melalui sarana lain.

Dalam mengkaji definisi-definisi yang telah disebutkan diatas, beberapa hal tampak jelas. Pertama, jelas bahwa unsur pokok diplomasi adalah negosiasi. Kedua, negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara. Ketiga, tindakan-tindakan diplomatis diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai. Oleh karena itu pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan utama diplomasi. Tetapi apabila cara damai gagal untuk menjaga kepentingan nasional, kekuatan boleh digunakan. Merupakan kenyataan umum bahwa terdapat keterkaitan erat antara diplomasi dan perang. Jadi poin keempat bisa dinyatakan sebagai suatu teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian. Kelima, diplomasi dihubungkan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara. Keenam, diplomasi modern dihubungkan erat dengan system negara. Ketujuh, diplomasi juga tak bisa dipisahkan dari perwakilan negara.

Dalam kasus sengketa wilayah di Laut China Selatan ini, Filipina menempuh jalur diplomasi dengan dua cara, pertama dengan mengajukan kasus ini ke pengadilan Arbitrasi Internasional. Manila mengajukan kasus itu ke Pengadilan Arbitrasi Internasional untuk Hukum Laut (UNCLOS) karena telah "menggunakan hampir semua jalan politik dan diplomatik bagi

penyelesaian yang dirundingkan." Filipina mengklaim perairan itu berdasarkan ketentuan konvensi PBB, yang ditandatangani oleh kedua negara, yang memungkinkan negara-negara untuk menyatakan zona ekonomi eksklusif sejauh 370 kilometer (200 mil laut) dari pantai. Pengajuan yang diajukan Filipina ini menjadi menarik karena sebenarnya Manila tidak bisa mengajukan sengketa wilayah kedaulatan mereka ke Mahkamah Internasional. Sebab, untuk mengajukannya, dibutuhkan persetujuan dari Tiongkok. Sementara itu, China jelas-jelas menolak. Namun, lewat prosedur perselisihan di bawah UNCLOS, Filipina bisa mengajukannya meski tidak ada persetujuan dari China. Proses di pengadilan arbitrase tersebut membutuhkan waktu lama. Dan juga, China secara konsisten menentang setiap langkah Filipina untuk membuat keluhannya menjadi internasional, sementara sering mengatakan bahwa kedua negara harus bekerja sama satu persatu demi perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.

Yang kedua adalah membawa permasalahan ini ke tingkat ASEAN. Filipina menginginkan ASEAN secara serius berfokus kepada permasalahan konflik Laut China Selatan ini, karena jika hal ini terus dibiarkan, maka akan mengganggu stabilitas kawasan ASEAN itu sendiri. Filipina menginginkan adanya kesepakatan yang mengikat antara 10 negara ASEAN dengan China. ASEAN sendiri sudah lama menghendaki yang dinamakan "Code of Conduct" (Pedoman Tata Tertib) antara ASEAN dan China untuk membereskan konflik seputar Laut China Selatan ini. Pedoman semacam ini sebenarnya sudah disinggung sebagai tujuan jangka panjang dalam deklarasi bersama antara

ASEAN dan China tahun 2002. Tetapi karena deklarasi ini tidak bersifat mengikat maka hingga kini deklarasi tersebut tidak bisa diterapkan secara optimal..

2) Analisa SWOT

Fredi Rangkuti menjelaskan bahwa Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang saat ini.⁸

Analisa SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*).

Faktor Eksternal dan Internal

Untuk menganalisa secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisa SWOT, yaitu:

⁸ Freddy Rangkuti, 2004, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta

Faktor eksternal

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya *opportunities* and *threats* (O dan T). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya.

Faktor internal

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya *strengths* and *weaknesses* (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional : pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen dan budaya perusahaan (*corporate culture*).⁹

Matrik SWOT

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif analisa:

⁹ Nisak, Zuhrotun. Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Kompetitif.

Tabel Matriks SWOT

	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
OPPORTUNITY (O)	ANALISA SO Analisa yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	ANALISA WO Analisa yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS (T)	ANALISA ST Analisa yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	ANALISA WT Analisa yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Analisa SO (*Strength-Opportunities*)

Analisa ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya

Analisa ST (*Strenghts-Threats*)

Adalah Analisa dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

Analisa WO (*Weknesses- Opportunities*)

Analisa ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

Analisa WT (*Weaknesses- Threats*)

Analisa ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.¹⁰

Kasus Filipina jika kita analisa dengan menggunakan Analisa SWOT dapat dijabarkan secara berikut:

Strength

1) Kepulauan Spratly ada di ruang lingkup Zona Ekonomi Eksklusif Filipina

Keputusan Filipina untuk mengajukan kasus di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan dengan pengadilan internasional di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) telah mendapat kritikan keras dari China. Kementerian luar negeri China bersikeras bahwa "penyebab langsung dari sengketa antara China dan Filipina adalah pendudukan ilegal yang terakhir dari beberapa pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan".¹¹

Namun, harus digarisbawahi bahwa Filipina tidak meminta pengadilan untuk memutuskan kedaulatan pulau-pulau dan karang di Laut Cina Selatan. Sebaliknya, Filipina mempertanyakan China dalam mendeklarasikan "garis sembilan-dash" China yang mengakibatkan menghilangnya zona ekonomi eksklusif Filipina (ZEE) yang sesuai dengan UNCLOS. UNCLOS memberikan 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) membentang dari garis pantai suatu negara. Sedangkan China dengan deklarasi "nine-Dash

¹⁰ Ibid

¹¹ <http://www.siaonline.org/page/insightsDetails/id/3147/ArticleCategoryId/7/#.VW-JOM-qqkq> diakses pada tanggal 21 Mei 2015

Line"-nya membatasi ZEE Filipina hingga 30 sampai 50 mil saja jauhnya dari pantai wilayah kedaulatan Filipina. Pengajuan arbitrase oleh Filipina itu menyatakan China melanggar UNCLOS – aturan penunjukan zona eksklusif ekonomi sebuah negara, yaitu 370 kilometer dari garis pantainya. Pengajuan arbitrase itu juga menyebut klaim China yang sudah berabad-abad terhadap hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan adalah ilegal.¹²

2) Filipina menang dalam sidang di *Permanent Court of Arbitration*

Hasil keputusan Pengadilan Arbitrase (Permanent Court of Arbitration) atas sengketa Laut China Selatan akhirnya dirilis pada tanggal 12 Juli 2016. Salah satu dari hasil keputusan itu menyebutkan bahwa pengadilan menolak klaim China atas hak ekonomi di wilayah yang selama ini ditandai dengan Sembilan garis putus-putus atau *nine-dash line*. Keputusan Pengadilan yang dikeluarkan di Den Haag itu menyatakan bahwa tak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim hak berdasarkan sejarah terhadap sumber daya di wilayah perairan yang termasuk di dalam *nine-dash line*.¹³

Mahkamah juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan China di perairan ini tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah China. Mahkamah mengatakan bahwa China telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa China telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Laut China Selatan dengan membangun pulau-pulau

¹² Ibid

¹³ <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160712172328-134-144369/pengadilan-arbitrase-tolak-klaim-china-di-laut-china-selatan/> diakses tanggal 18 Agustus 2016

buatan. Hakim di pengadilan ini mendasarkan putusan mereka pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditandatangani baik oleh pemerintah China maupun Filipina.¹⁴ Meskipun putusan yang dihasilkan Mahkamah Arbitrase mengikat, namun mahkamah itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan. China telah memboikot mahkamah tersebut dan berargumen bahwa institusi itu tidak memiliki yurisdiksi. Apapun putusan mahkamah, Cina telah telah mengatakan tidak akan “menerima, mengakui, atau melaksanakan”.¹⁵

Akan tetapi, putusan mahkamah justru menguntungkan Filipina, reputasi Cina berisiko rusak dan dilihat sebagai negara yang mengabaikan hukum internasional. Ketegangan juga diperkirakan meningkat antara Cina dan Filipina, atau Amerika Serikat yang memiliki aset militer di Laut Cina Selatan.¹⁶

Weakness

1) Kekuatan militer yang sangat jauh dibawah China

Dalam konflik Laut China Selatan ini, posisi kekuatan militer Filipina adalah yang paling buncit. Dalam Global Firepower, Filipina menempati urutan ke-40, jauh dibawah China, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.¹⁷ Di

¹⁴ http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160712_dunia_putusan_lautcinaselatan diakses tanggal 18 Agustus 2016

¹⁵ http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711_dunia_filipina_cina_mahkamah_preview diakses tanggal 18 Agustus 2016

¹⁶ Ibid

¹⁷ http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=philippines diakses pada tanggal 31 Mei 2015

lapangan, hal ini terlihat dari alutsista dan persenjataan yang telah uzur. Hal inilah yang membuat China merasa di atas angin sehingga China leluasa untuk bergerak di Laut China Selatan.

2) Kekuatan ekonomi yang lebih lemah daripada China.

Perbedaan kekuatan ekonomi sangat terlihat jika membandingkan kekuatan ekonomi antara Filipina dan China. Dalam data yang dirilis oleh *World Bank*, Jumlah GDP China pada tahun 2015 saja jumlahnya sudah berkali-kali lipat dari GDP Filipina pada tahun yang sama. Lebih jelasnya akan dijelaskan oleh tabel dibawah ini.

Tabel Indikator Ekonomi

No	Negara		
	Indikator		
		Filipina	China
1	<i>Population</i>	100.7 million	1.371 billion
2	<i>GDP</i>	\$292.0 billion	\$10.87 trillion
3	<i>GDP Growth</i>	5.8%	6.9%
4	<i>Inflation</i>	1.4%	1.4%

Sumber Tabel: <http://www.worldbank.org/en/country/philippines> dan <http://www.worldbank.org/en/country/china>

3) Situasi Politik internal Filipina yang tidak stabil.

Filipina, terutama Filipina bagian selatan mempunyai sejarah panjang tentang konflik dengan kelompok bersenjata, seperti separatis muslim, komunis, kelompok militant, dan grup kriminal. Hal ini menyebabkan

konsentrasi pasukan bersenjata Filipina lebih terfokus terhadap ancaman dalam negeri (*internal threat*) dibandingkan ancaman eksternal, sehingga Filipina tidak seluruhnya berfokus kepada keamanan di Laut China Selatan.

Daftar-daftar kelompok bersenjata di Filipina adalah sebagai berikut:

a) MNLF

Moro National Liberation Front (MNLF) adalah organisasi yang didirikan oleh Nur Misuari pada tahun 1971, dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Filipina dan memerdekakan diri. Meskipun di wilayah Moro dan sekitarnya sudah diberi otonomi khusus oleh Ms Aquino pada tahun 1989, namun hubungan antara pemerintah Filipina dan MNLF masih pasang-surut hingga sekarang.¹⁸

b) MILF

Moro Islamic Liberation Front dianggap sebagai kelompok pemberontakan muslim terbesar di negara tersebut. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1981 setelah pemimpinnya, Salamat Hasyim, memisahkan diri dari MNLF pada tahun 1978. MILF sebagian besar berbasis di pulau-pulau terpencil di Mindanao tengah sejak tahun 1997, kelompok ini telah memiliki serangkaian pembicaraan damai dengan pemerintahan Filipina, yang sebagian besar di mediasi oleh Malaysia dari tahun 2003 sampai sekarang.¹⁹

¹⁸ <http://www.bbc.com/news/world-asia-17038024> diakses pada tanggal 13 Agustus 2016

¹⁹ *Ibid*

c) Abu Sayyaf

Abu Sayyaf adalah kelompok terkecil dan paling radikal dari semua kelompok separatis Islam di Filipina Selatan. Mereka lebih dikenal karena sering melakukan penculikan demi tebusan dan juga menebarkan terror dengan melakukan pengeboman untuk mencapai tujuan mereka.²⁰

Abu Sayyaf merupakan pecahan dari MNLF pada tahun 1991 pada tahun 1991 di bawah kepemimpinan Abdurajik Abubakar Janjalani. Diketahui bahwa kelompok ini berafiliasi dengan Al Qaeda dan Jemaah Islamiyah, dan kabar terbaru menyebutkan bahwa Abu sayyaf sekarang juga menjalin hubungan dan berafiliasi dengan *Islamic State* (IS).²¹

d) New People's Army

New People's Army adalah sayap militer dari Partai Komunis Filipina (CPP) yang didirikan pada tahun 1969 oleh Jose Maria Sison. CPP dianggap sebagai salah satu pemberontakan komunis tertua di dunia yang bertujuan untuk menggulingkan Pemerintah Filipina dengan menggunakan taktik gerilya. Pemberontakan yang dilancarkan oleh NPA selama bertahun-tahun dilaporkan menjadi salah satu yang paling mematikan di Filipina. Beberapa kali Pemerintah Filipina dan CPP melakukan pembicaraan guna mencapai kesepakatan damai, namun hingga sekarang kesepakatan damai tersebut belum tercapai.²²

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

Oportunity

- 1) Peningkatan latihan militer bersama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama

Filipina akhir-akhir ini meningkatkan kerjasama militer dengan Amerika Serikat, Filipina meminta Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan dengan Asia dan focus pada perkembangan terakhir di Laut China Selatan. Menteri Luar Negeri Filipina, Del Rosario mengatakan hubungan kerjasama ini berfokus pada aspek ekonomi dengan kombinasi aspek keamanan dan pertahanan. Selain itu kerja sama ini dilakukan agar Amerika Serikat memberi bantuan kepada Filipina yang saat ini sedang menghadapi pengepungan yang dilakukan China di Laut China Selatan. Sebelumnya Filipina dan Amerika Serikat mengadakan latihan militer bersama yang melibatkan 6.000 tentara Filipina dan 6.500 tentara Amerika Serikat. Latihan militer bersama ini menjadi tanda bahwa kerja sama militer antar dua negara meningkat di banding tahun-tahun sebelumnya.²³

- 2) Bantuan militer dari Amerika Serikat.

Pada tahun 2014 lalu, Filipina dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian dalam bidang militer yang bernama The Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). *The Enhanced Defence Cooperation Agreement* (EDCA) atau Perjanjian Peningkatan Kerjasama Pertahanan adalah

²³ <http://www.philstar.com/headlines/2015/05/14/1454687/philippines-urges-us-focus-south-china-sea-dispute> diakses pada tanggal 5 Juni 2015

perjanjian antara Amerika Serikat dan Filipina yang dimaksudkan untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dan Filipina di bidang pertahanan militer. Perjanjian ini memungkinkan Amerika Serikat untuk mengirim pasukannya ke Filipina, selain itu Amerika Serikat juga mempunyai akses untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas di pangkalan Filipina, namun dengan beberapa persyaratan tertentu, salah satunya adalah Amerika Serikat tidak diperbolehkan untuk membangun pangkalan militer permanen, dan Amerika Serikat juga harus memberikan Filipina akses personil ke dalam kapal dan pesawat milik Amerika Serikat.²⁴

Selain itu, Filipina juga akan mendapatkan paket bantuan dana dari Amerika Serikat yang terbesar dalam 15 tahun terakhir untuk membantu negara tersebut untuk meningkatkan perlengkapannya militernya, Rencananya Filipina akan menerima 79 Juta US Dollar dalam bentuk bantuan militer tahunan, jumlah ini naik disbanding bantuan tahun sebelumnya yang berjumlah 50 juta US Dollar.²⁵

3) Bantuan Soft-loan dari Pemerintah Jepang dalam bentuk kapal Coast Guard.

Pada tanggal 18 Agustus 2016 lalu, Filipina mendapat kiriman kapal Coast Guard pertama dari Jepang. Kapal ini digunakan oleh Coast Guard Filipina untuk membantu meningkatkan keamanan dan penegakan hukum

²⁴ <http://globalnation.inquirer.net/133741/filipinos-asked-who-do-you-want-on-your-side> diakses pada tanggal 5 Juni 2015

²⁵ <http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-to-get-largest-us-military-aid-package-since-2000> diakses pada tanggal 23 Juli 2015

maritime di Laut China Selatan di mana ketegangan telah meningkat karena Filipina menghadapi sengketa teritorial dengan China.²⁶

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan dimana diperkirakan sekitar \$5 Triliun perdagangan yang melintasi wilayah laut ini setiap tahun. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim di kawasan yang diyakini memiliki simpanan yang kaya minyak dan gas tersebut.

Jepang memang tidak memiliki klaim di Selat Malaka tetapi Jepang khawatir jika militer China menjangkau alur laut strategis yang banyak dilalui kapal-kapal dagang Jepang tersebut.²⁷

Kapal ini mempunyai panjang 44 meter, dan akan digunakan oleh Coast Guard Filipina untuk menjalankan tugas patrol dan penegakan hukum maritime. Kapal ini juga akan digunakan untuk tugas kemanusiaan dan bantuan penanganan bencana. Jepang akan mengirimkan Sembilan kapal Coast Guard tambahan kepada Filipina dengan nilai 7,3 miliar Peso (\$158 juta) dari pinjaman lunak *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Sebagai tambahan, Jepang dan Filipina sedang dalam pembicaraan tentang penambahan dua kapal Coast Guard berukuran besar senilai 10 miliar Peso (\$215 juta) dan menyewa empat pesawat patrol ringan TC-90.²⁸

²⁶ <http://www.reuters.com/article/us-southchinasea-philippines-japan-idUSKCN10T11V> Diakses pada tanggal 23 Juli 2015

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

Threat

1) Reklamasi China atas pulau-pulau kecil dan koral di LCS.

China semakin agresif dalam pergerakannya di Laut China Selatan. Hal ini diperkuat dengan dibangunnya sejumlah reklamasi besar-besaran di area konflik. Reklamasi ini diduga akan digunakan oleh China sebagai pangkalan militernya untuk menjaga Laut China Selatan. Hal ini bisa dilihat dari salah satu pulau reklamasi yang mempunyai landasan pesawat terbang yang cukup untuk didarati pesawat pembom jarak jauh. Beberapa reklamasinya ada di Fiery Cross Reef, Gaven-Riff, Johnson South Reef, dan Hughes-Riff yang kesemuanya berada di kepulauan spartly dekat Filipina.²⁹

2) Banyaknya Kapal Coast Guard China yang berpatroli di LCS.

Setelah putusan Majelis Arbitrase yang memutuskan bahwa tidak ada dasar hukum bagi China untuk mengklaim Laut China Selatan berdasarkan Sejarah dengan *nine-dash line*-nya. Namun pergerakan China di kawasan Laut China Selatan masih agresif.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kapal-kapal Coast Guard China, dan memblokir akses nelayan-nelayan Filipina ke laut sekitar area Terumbu Karang Scarborough. Nelayan-nelayan Filipina terutama dari kawasan Zambales mengungkapkan bahwa mereka sering dicegah masuk ke kawasan terumbu karang Scarborough oleh kapal-kapal Coast Guard China, Kapal-kapal Coast Guard China tersebut bahkan menurunkan dua perahu karetinya dan

²⁹ <http://www.dw.de/pangkalan-militer-cina-di-laut-cina-selatan/g-18292381> diakses pada tanggal 12 Juni 2015

mengitari kapal nelayan Filipina seraya meneriakkan, “ini adalah penjaga pantai China, kami sedang menjalankan penegakan hukum, segera tinggalkan daerah ini segera.” Daripada mengambil resiko yang lebih jauh, kapal-kapal nelayan Filipina banyak yang memutuskan untuk kembali ke Zambales tanpa membawa hasil sama sekali.³⁰

Untuk nelayan Filipina yang berada di Masinloc, Santa Cruz, dan kota pelabuhan Zambales, Kapal-kapal China tersebut mencegah mereka ke daerah sumber daya yang kaya ikan yang mengakibatkan kehidupan mereka terancam. Terumbu karang Scarborough termasuk daerah yang kaya hasil laut. Nelayan mengklaim mereka bias mengangkut hingga 10.000 ton ikan dan makanan laut lainnya selama sekpedisi memancing. Namun kehadiran Kapal Coast Guard China yang mulai hadir sekitar tahun 2012 tersebut mau-tidak mau membuat mereka kehilangan kawasan kaya hasil laut tersebut.³¹

3) Pengaruh China di komunitas ASEAN

China masih menjadi negara yang sangat berpengaruh di negara-negara Asia Tenggara. Sebagian anggota ASEAN masih menganggap Beijing sebagai mitra yang menguntungkan meski sebagian lain menganggap negeri tirai bambu itu sebagai bumerang. Ketidakberdayaan ASEAN di depan China terlihat dengan adanya berbagai pandangan menyangkut sikap mereka terhadap Beijing. Dalam kasus sengketa Laut China Selatan, China masih memiliki

³⁰ <http://cnnphilippines.com/news/2016/07/15/scarborough-shoal-filipino-fishermen-chinese-coast-guard.html> diakses pada tanggal 25 Agustus 2016

³¹ Ibid

kedekatan dengan beberapa anggota ASEAN. Selain itu, beberapa negara ASEAN juga enggan berkonflik dengan China. Mereka menganggap China bukanlah negara yang harus dimusuhi. Jadi ASEAN bisa dijadikan ajang bagi China untuk menebarkan pengaruh.³²

Namun di sisi lain Filipina dan Vietnam sangat menentang segala tindakan klaim China di Laut China selatan, terutama dalam isu reklamasi China terhadap pulau-pulau karang di Kepulauan Spratly. Filipina juga menyerukan agar ASEAN membuat pernyataan bahwa aktivitas reklamasi agai tindakan yang bermasalah. Namun tidak semua negara anggota menyetujui usul Filipina tersebut.³³

Ketidaksetujuan tersebut dipaparkan oleh Menlu Malaysia selaku tuan rumah KTT ASEAN tahun 2015, Menlu Malaysia Anifah Aman menyatakan bahwa mereka menolak ide untuk ikut campur dan berkonflik dengan China. ASEAN harus menghindari segala tindakan kontraproduktif yang membuat anggota ASEAN semakin menjauh. Oleh karena itu, draft salinan pernyataan terakhir pertemuan KTT ASEAN 2015 tersebut tidak menyinggung ketegangan Laut China Selatan sama sekali, hal tersebut mirip dengan KTT ASEAN 2012 di Kamboja lalu, yang tidak menghasilkan kesepakatan apapun tentang isu Laut China Selatan.³⁴ Ketidak kompakannya inilah yang membuat Isu LCS akan jauh dari kata selesai.

³² <http://nasional.sindonews.com/read/994235/149/asean-tak-berdaya-hadapi-china-1430103333> diakses pada tanggal 13 Agustus 2016

³³ Ibid

³⁴ Ibid

Tabel Analisa Matrix SWOT Filipina

		OPPORTUNITY			THREAT		
		1	2	3	1	2	3
STRENGHT	Keputlanaan Spratly sebagian besar berada di nuang lingkup Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.	1	2	3	1	2	3
		1	2	3	1	2	3
	<p>Filipina memenangkan pengadilan di PCA dalam kasus sengketa Laut China Selatan.</p> <p>WEAKNESS</p> <p>Kekuatan militer yang sangat jauh tertinggal dibawah China.</p> <p>Kekuatan ekonomi yang lebih lemah daripada China.</p> <p>Situasi Politik internal Filipina yang tidak stabil.</p>	<p>Peningkatan latihan militer bersama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama</p> <p>Bantuan militer yang meningkat dari US.</p> <p>Bantuan Soft-loan dari Jepang dalam bentuk kapal Coast Guard</p>	<p>Reklamasi China atas pulau-pulau kecil dan oral di LCS.</p> <p>Banyaknya Kapal Coast Guard China yang berpatroli di LCS.</p> <p>Pengaruh China di komunitas ASEAN</p>				
	<p>1. Peningkatan militer bersama negara lain terutama dengan Amerika Serikat di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina terutama di Laut China Selatan bisa dianggap sebagai pesan Filipina kepada di LCS tentang sikapnya di LCS</p> <p>2. Bantuan militer yang meningkat dari US terutama tambahan alutsista dari Progam EDCA Amerika serikat dan program pujungan Lunak dari Jepang, diringi dengan dukungan dari negara-negara besar yang mempunyai kepentingan yang sama membuat Filipina memiliki moril internasional yang tinggi.</p> <p>3. Kemenangan Filipina di PCA membuat posisi bargaining Filipina sedikit meningkat, hal ini bisa dimanfaatkan Filipina untuk meningkatkan dukungan internasional. Atau bisa digunakan tambahan bargaining untuk menghadapi China.</p>	<p>1. Kekuatan militer yang tertinggal dengan China dapat ditutupi dengan Bantuan US untuk melengkapi peralatan bersenjata Filipina. Dan bantuan Kapal Coast Guard dari Jepang untuk patrol maritime.</p> <p>2. Mengadakan kerjasama ekonomi secara intensif dengan negara-negara yang berseberangan dengan China, seperti Korea dan Jepang.</p> <p>3. Memilih bantuan alutsista bantuan dari EDCA US yang bisa dipakai untuk menghadapi ancaman internal dan ancaman eksternal.</p>	<p>1. Reklamasi pulau-pulau kecil di LCS oleh China memang telah dilakukan, namun putusan PCA menyatakan bahwa pulau reklamasi yang dilakukan oleh china adalah ilegal, dan keputusan ini membuat posisi moril Filipina di mata internasional meningkat.</p> <p>2. Meningkatkan patroli oleh Angkatan Laut dan Coast Guard di wilayah ZEE Filipina yang sering dilalui oleh Coast Guard China.</p> <p>3. Meneakan ASEAN untuk membuat aturan yang mengikat antar negara ASEAN dan China dalam menyangkut sengketa Laut China Selatan.</p>				
	<p>1. Kekuatan militer yang tertinggal dengan China dapat ditutupi dengan Bantuan US untuk melengkapi peralatan bersenjata Filipina. Dan bantuan Kapal Coast Guard dari Jepang untuk patrol maritime.</p> <p>2. Mengadakan kerjasama ekonomi secara intensif dengan negara-negara yang berseberangan dengan China, seperti Korea dan Jepang.</p> <p>3. Memilih bantuan alutsista bantuan dari EDCA US yang bisa dipakai untuk menghadapi ancaman internal dan ancaman eksternal.</p>	<p>1. Reklamasi China atas pulau-pulau kecil dan oral di LCS.</p> <p>Banyaknya Kapal Coast Guard China yang berpatroli di LCS.</p> <p>Pengaruh China di komunitas ASEAN</p>	<p>1. Meningkatkan deterrence factor, yaitu dengan kehadiran kapal patroli Angkatan Laut dan Coast Guard di area-area ZEE yang berseberangan dekat dengan pulau reklamasi. Serta patroli di daerah2 yang rawan dengan konflik internal.</p> <p>2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menjalin partner kerjasama ekonomi dengan negara yang berseberangan dengan China.</p> <p>3. Meneakan ASEAN untuk membuat Code of Conduct yang mengikat untuk penyelesaian masalah LCS diantara negara2 ASEAN dan China</p>				

D. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan dari kerangka berpikir, dapat ditarik kesimpulan sementara (hipotesis) yaitu : strategi Filipina dalam menghadapi China dalam konflik Laut China Selatan adalah Sebagai berikut:

- Dengan strategi Diplomasi :
 - Dengan mengajukan Arbitrasi ke Pengadilan Arbitrasi Internasional.
 - Mendesak ASEAN untuk menetapkan *Code of Conduct* yang bersifat mengikat antar anggota ASEAN.
- Dengan strategi Militer :
 - Dengan meningkatkan kekuatan militernya terutama dalam bidang pertahanan (*defensive*), untuk meredam kekuatan China di Laut China Selatan.
 - Membentuk kerjasama/Aliansi bidang pertahanan dengan negara lain agar bisa mengimbangi kekuatan China.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini menggunakan bahan-bahan pustaka seperti jurnal-jurnal, buku-buku, literatur, artikel, dan surat kabar. Tambahan data-data bisa juga berasal dari internet atau situs-situs yang relevan dengan judul penelitian.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan tahun 2010 hingga 2015 atau saat ini. Dikarenakan pada tahun-tahun tersebut China semakin agresif dalam klaim wilayah Laut China Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat 4 bab yang saling berhubungan. Hubungan antar bab bersifat sistematis dan berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB I

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, metode pengumpulan data, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini akan menguraikan sejarah Konflik Laut China Selatan.

BAB III

Bab ini akan menjelaskan Kepentingan Filipina di Laut China Selatan.

BAB IV

Bab ini akan menjelaskan tentang strategi Filipina dalam menghadapi Konflik Laut China Selatan.

BAB V

Bab Kesimpulan, berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya.